

RINGKASAN

Rendahnya partisipasi politik merupakan masalah global. Di Indonesia sendiri, partisipasi politik elektoral warga negara cenderung menurun dalam waktu setengah abad (1970 – 2020). Karena partisipasi politik berbasis keikhlasan dan energi utama sistem politik, maka tidak mengherankan jika isu partisipasi politik termasuk salah satu komponen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disuarakan Perserikatan Bangsa - Bangsa. Di saat yang sama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin memfasilitasi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Di beberapa negara maju, misalnya dalam kasus petisi digital, institusi politik formal sudah mengadopsi dan melegalkan praktik-praktik partisipasi warga negara berbasis digital. Sebaliknya, Indonesia belum melegalkan petisi digital. Padahal, sebagian warga negara Republik Indonesia, seperti ditunjukkan hasil survei *World Value Survey VII (WVS VII)*, pernah berpartisipasi dalam petisi digital yang diinisiasi beragam aktor politik.

Bertolak dari situasi di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa warga negara Republik Indonesia tetap berpartisipasi dalam petisi digital meski mekanisme partisipasi politik ini belum dilegalkan pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti memanfaatkan *raw data WVS VII* yang melibatkan 3.000 responden asal Indonesia. Survei WVS diorganisir oleh *World Values Survey Association (WVSA)* yang telah melaksanakan WVS sejak 1981. Indonesia sendiri baru dimasukkan sebagai salah satu lokasi penelitian dalam WVS VII dengan jumlah responden sebanyak 3000 (tiga ribu) orang penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan dipilih secara acak. Proses pengumpulan data lapangan WVS VII dilaksanakan pada 2017 – 2021 di 60 (enam puluh) negara.

Teknik regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh empat belas variabel bebas terhadap variabel terikat (partisipasi pengguna internet dalam petisi digital/Y). Empat belas variabel bebas tersebut adalah: jenis kelamin (X_1), umur (X_2), status pernikahan (X_3), tingkat pendidikan (X_4), status pekerjaan (X_5), kelas sosial (X_6), agama (X_7), lokasi tempat tinggal (X_8), rasa percaya terhadap masyarakat (X_9), rasa percaya terhadap institusi pemerintah (X_{10}), rasa percaya terhadap parlemen (X_{11}), religiositas (X_{12}), tingkat kebahagiaan (X_{13}), dan kecenderungan ideologis (X_{14}). Proses pengolahan data menggunakan perangkat lunak STATA 15.

Penelitian ini menemukan bahwa dari sebelas variabel bebas yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi partisipasi warga negara dalam penanda-tanganan petisi digital (Y), hanya tujuh variabel bebas yang signifikan mempengaruhi Y. Model final regresi logistik yang berisi tujuh variabel bebas ini mampu menjelaskan Y sebesar 4.52% secara signifikan, $X^2(7) = 169.60, p < 0.01$. Dari tujuh variabel bebas ini, empat memiliki hubungan positif dan mampu menjelaskan Y masing-masing sebesar 195% (X_2), 145% (X_{14}), 156% (X_1), dan 143% (X_4) secara signifikan, $p < 0.01$. Tiga variabel bebas lainnya memiliki hubungan negatif yang signifikan, $p < 0.01$, dan mampu menjelaskan Y masing-masing sebesar 63% (X_{12}), 76% (X_{10}), dan 80% (X_3). Semua variabel bebas signifikan pada level $p < 0.01$, kecuali X_3 yang signifikan di level $p < 0.05$. Model final ini menghasilkan karakteristik responden yang memiliki peluang berpartisipasi dalam petisi digital, yakni: berusia muda, tidak religius, berideologi liberalisme, laki-laki, berpendidikan >SMA/ sederajat, tidak percaya terhadap organisasi pemerintah, dan belum menikah. Model final yang dihasilkan penelitian ini selaras dengan data lapangan.

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dan para pihak yang terkait dengan petisi digital untuk: (a) meningkatkan religiositas warga, meningkatkan kuantitas, akses dan kualitas tingkat pendidikan, edukasi ideologi, dan memelihara rasa percaya warga terhadap organisasi pemerintah; (b) mendorong agar DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengadopsi secara formal mekanisme petisi digital sebagai saluran resmi warga untuk mengartikulasikan aspirasi politik mereka.

Penelitian ini menghasilkan: (a) 2 (dua) skripsi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini; (b) 1 (satu) jurnal artikel ilmiah berjudul “*Factors contributing to internet users participation in digital petition*” yang sudah dikirimkan ke Jurnal [Society](#) (FISIP Universitas Bangka Belitung) yang ter indeks [SINTA 2](#). TKT penelitian ini berada di level 4. Tabel 3 memperlihatkan ringkasan luaran dan target capaian penelitian ini.

Kata kunci: e-partisipasi, Indonesia, partisipasi politik, petisi digital, World Value Survey

SUMMARY

Low political participation is a global problem. In Indonesia, during 1970 – 2020 periods, citizens' electoral political participation tends to decline. Since political participation is based on sincerity and the main energy of the political system, it is not surprising that the issue of political participation is one of the components of the Sustainable Development Goals voiced by the United Nations. At the same time, the development of information and communication technology has made it easier for citizens to participate in the political process. In some developed countries, for example in the case of digital petitions, formal political institutions have adopted and legalized digital-based citizen participation practices. Although Indonesia has not legalized digital petitions, some citizens of the Republic of Indonesia, as shown by the results of the World Value Survey VII (WVS VII), have participated in digital petitions initiated by various political actors.

Starting from the situation above, this study seeks to answer the question why do citizens of the Republic of Indonesia continue to participate in digital petitions even though the mechanism for political participation has not been legalized by the government? To answer this question, the researchers used WVS VII raw data involving 3,000 respondents from Indonesia. The WVS VII survey was organized by the World Values Survey Association (WVSA) which has been carrying out WVS since 1981. Indonesia has added as one of the research locations in WVS VII. In Indonesia, 3000 (three thousand) Indonesian residents aged over 18 (eighteen) and selected randomly has been participated as respondent of WVS VII. The WVS VII field data collection process was carried out in 2017 – 2021 in 60 (sixty) countries.

Logistic regression technique was used to examine the effect of fourteen independent variables on the dependent variable (participation of internet user in digital petitions/ Y). The fourteen independent variables are: sex (X_1), age (X_2), marital status (X_3), education level (X_4), employment status (X_5), social class (X_6), religion (X_7), location of residence (X_8), trust on society (X_9), trust on government institutions (X_{10}), trust on parliament (X_{11}), religiosity (X_{12}), level of happiness (X_{13}), and ideological orientation (X_{14}). Data processing using STATA 15 software.

This study found that of the eleven independent variables that were considered as factors affecting citizen participation in signing digital petition (Y), only seven independent variables significantly affected Y . The final logistic regression model containing seven independent variables was able to explain Y of 4.52% significantly, $X^2(7) = 169.60$, $p < 0.01$. Of these seven independent variables, four have a positive relationship and can explain Y by 195% (X_2), 145% (X_{14}), 156% (X_1), and 143% (X_4) significantly, $p < 0.01$. The other three independent variables had a significant negative relationship, $p < 0.01$, and can explain Y by 63% (X_{12}), 76% (X_{10}), and 80% (X_3), respectively. All independent variables were significant at the level of $p < 0.01$, except for X_3 , which was significant at the level of $p < 0.05$. This final model produces the characteristics of respondents who could participate in digital petitions, namely: young age, not religious, having liberalism ideology, male, educated > high school/equivalent, trust to government organizations, and unmarried. The final model produced by this study is in line with the field data.

This study recommends the government and parties related to digital petitions to: (a) increase the religiosity of citizens, increase the quantity, access and quality of education levels, ideological education, and maintain citizens' trust on government

organizations; (b) encourage the House of Representative, Provincial People's Representative Council, and District People's Representative Council to formally adopt a digital petition as an official channel for citizens to articulate their political aspirations. This research produced: (a) two theses of students involved in this research; (b) one scientific manuscript entitled "*Factors contributing to internet users participation in digital petition*" which has been submitted to [Society](#) indexed by [SINTA](#).

Key words: digital petition, e-participation, Indonesia, political participation, World Value Surve